

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN PUJON TAHUN 2023

**RENCANA KERJA KECAMATAN PUJON
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Pujon merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, prosedur, dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Tata kelola dari pemerintahan yang baik, merupakan wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang administrasi, ekonomi, dan Politik demi mengatur segala permasalahan yang terjadi.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai Perkembangan saat ini, Perencanaan Pembangunan Daerah yang dahulu menggunakan Aplikasi yang berbasis pada *e-planning* sekarang berbasis pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Bisa diartikan Juga Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah Suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data Pembangunan Daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

Penggunaan aplikasi *e-Planning (e-RKPD/e-Renja)* telah diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Malang, dan telah sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 14 yang menyatakan bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus berbasis *e-Planning*. Dengan terimplementasinya *e-Planning* maka seluruh program kerja yang dilakukan dapat terintegrasi, dioptimalkan dan kemungkinan tidak selarasnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah dapat diatasi serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat dan tepat. Dengan adanya beberapa sistem aplikasi yang ada di *e-Planning* serta aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang terus berupaya mengoptimalkan komunikasi, koordinasi dan kerja sama pengelolaan data penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang baik dengan *stakeholders* terkait, serta mengarahkan perangkat daerah untuk menyusun data perencanaan tahunan dan 5 (lima) tahunan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Seiring dengan berjalannya waktu dan karena adanya Peraturan baru dari Menteri Dalam Negeri maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2020 Nomor 130/736/SJ/2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah, maka sebagai wujud pelaksanaan ketentuan tersebut untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini wajib melalui Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang digunakan saat ini bersifat Online dan Nasional. Serta sesuai ketentuan, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 harus sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kecamatan Pujon perlu menyesuaikan peraturan yang terbaru pada dokumen tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja serta dokumen Rencana Strategis 5 (lima) tahunan.

Beberapa proses yang harus dilaksanakan dalam penyusunan dokumen. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) tahapan utama yaitu:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan Rencana Kerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

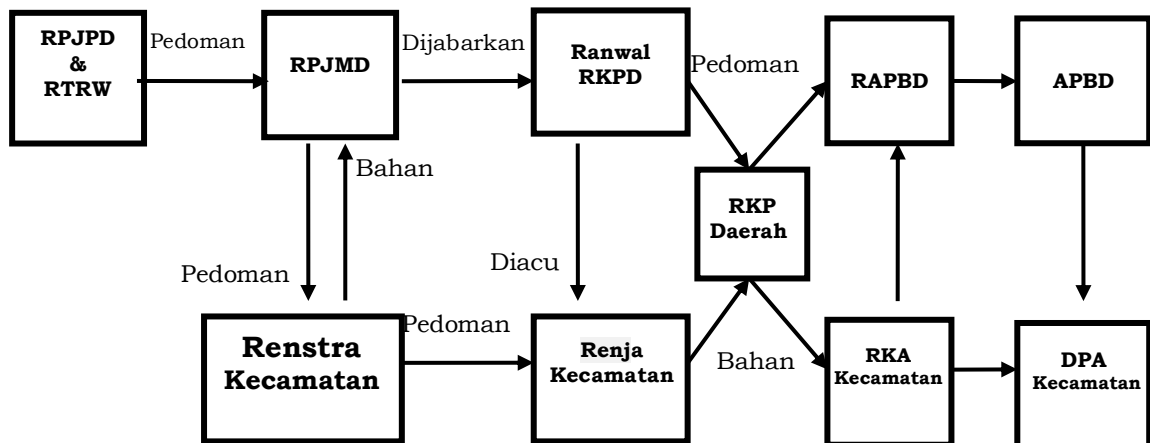
Dalam Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 melalui beberapa tahapan atau proses. Tahapan atau Proses dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2023 di tindak lanjuti setelah adanya radiogram Bupati Malang tanggal 7 Desember 2021 Nomor: 005/713/35.07.031/2021 perihal Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023. Surat Edaran Bupati Malang tanggal 13 April 2022 Nomor 3156 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 18 April 2022 Nomor: 150/4734/35.07.202/2022 perihal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 18 Mei 2022 Nomor: 050/5739/35.07.202/2022 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dengan di dukung oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang pada awal tahun anggaran sudah membentuk tim dalam rencana pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, dan melalui beberapa proses maka disahkan dan dikeluarkannya Keputusan Bupati Malang tanggal 1 Maret 2022 Nomor: 188.45/91/KEP/35.07.013/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2023. Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian program, kegiatan, sub kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja dan pendanaan indikatif. Sehingga sebagai dasar dalam pelaksanaan Rencana Kerja di tahun berikutnya.

Perencanaan dibuat supaya dalam pelaksanaannya bisa sesuai dengan target baik kinerja dan pelaksanaan anggarannya, yang pada akhirnya bisa meminimaliser kendala atau kegagalan. Walaupun pada kenyataan ada beberapa kendala di luar perencanaan yang sudah dibuat, kendala yang dimaksud adalah mungkin adanya bencana alam (banjir bandang, tanah longsor, puting beliung dan lain-lain) serta bencana non alam (wabah *Virus covid-19*, *Stunting*, dan masalah lainnya) yang terjadi. Sehingga bisa menghambat pelaksanaan Pembangunan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”** dengan 5 Misi, dan yang berkaitan dengan Pemerintahan Kecamatan Pujon adalah Misi 3 untuk itu Kecamatan Pujon Mendukung Misi 3 yaitu **Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa**. Disamping itu juga sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Kecamatan Pujon selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pujon. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud akan menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah. Berikut dibawah ini akan kami sajikan hubungan atau keterkaitan antar dokumen perencanaan

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Tahun sebelumnya, serta mengacu Pada Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu. Disamping itu berdasarkan Pada Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2023 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pujon Tahun 2023, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023 yang semuanya sudah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pujon untuk mengetahui Realisasi Pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 226 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pujon Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 226 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 11 Seri D);
24. Keputusan Bupati Malang Nomor :188.45/91/KEP/35.07.013/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2023 adalah:

1. Mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pujon Tahun 2023 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah

sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023;

3. Bahan evaluasi perencanaan tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Pujon
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pujon
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pujon
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pujon
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Pujon

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada tahun 2021 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Tingkat capaian kinerja program sampai akhir Tahun 2021 mencapai 100%. Dan Program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah Pertama, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kedua, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Ketiga, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Keempat, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kelima, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Keenam, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun kegiatan yang terlaksana, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindak lanjutnya pada akhir tahun dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD IV tahun 2021 Kegiatan telah mencapai target sesuai perencanaan hal ini karena koordinasi yang baik antara semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kecamatan Pujon.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Realisasi Kinerja tercapai sebesar 90,26% hal ini disebabkan karena adanya kelebihan perhitungan dari bagian gaji sehingga ada sisa anggaran yang belum terserap karena sub kegiatan ini merupakan sub Kegiatan baru di tahun 2021. Tindak lanjut yang dilakukan adalah akan lebih meningkatkan koordinasi dengan BKAD Kabupaten Malang.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, realisasi anggaran tercapai 98,56% hal ini disebabkan karena Pembayaran BPJS yang direncanakan 6 Orang terrealisasi hanya 4 orang (1 Orang mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, 1 Orang lagi karena belum masuk database Kabupaten Malang). Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu akan berkoordinasi dengan BPJS di tahun anggaran berikutnya.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dalam sub kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan target perencanaan, hal ini karena adanya koordinasi yang baik semua pihak yang berkepentingan di kantor Kecamatan Pujon.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sudah dilaksanakan sesuai target perencanaan, dengan penggunaan anggaran yang optimal dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan kecamatan Pujon.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, realisasi 99,72% hal ini disebabkan karena secara realita kebutuhan sudah tercukupi dan sebagai tindak lanjut yang bisa diambil adalah perhitungan yang lebih matang lagi pada anggaran tahun berikutnya.
 - d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pada tahun 2021 sudah terlaksana sesuai target perencanaan hal ini disebabkan karena adanya kegiatan fasilitasi kunjungan tamu yang intensitasnya sudah sangat maksimal. Dan akan tetap dipertahankan capainnya pada tahun berikutnya.
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan pada tahun 2021 sudah sangat maksimal dan sering intensitasnya baik koordinasi dan konsultasi yang sifatnya intern maupun ekstern dengan dinas atau OPD terkaet serta muspika yang ada di lingkungan kantor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sehingga baik kinerja maupun anggarannya sudah terserap sesuai perencanaan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya sudah dilaksanakan sesuai target perencanaan sehingga kinerja dan anggaran terserap maksimal, keberhasilan ini di dukung karena koordinasi yang baik dengan pimpinan (Camat) untuk pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terutama pada pengadaan sarana dan prasarana yang memang diperlukan dalam menunjang operasional atau kegiatan kantor Kecamatan Pujon.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun 2021 sudah sesuai dengan target perencanaan rencana kerja hal ini disebabkan karena sudah maksimal pelaksanaan kinerja maupun anggaran yang terserap. Dengan banyaknya surat surat keluar termasuk Himbauan, edaran, pemberitahuan, laporan, undangan serta jenis surat lainnya sehingga kegiatan Pemerintahan tetap berjalan sesuai perencanaan di awal tahun anggaran.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik untuk penyerapan anggaran belum maksimal, hal ini disebabkan karena pada semester awal secara realita penyerapan sangat minim sekali. Setelah adanya mesin ADM dari Dispendukcapil serta memang kebutuhan meningkat maka dilakukan penambahan daya listrik dan jaringan internet di ruang pelayan dan pendopo Kecamatan Pujon sehingga penyerapan anggaran sudah meningkat walaupun belum mencapai target 100% di akhir triwulan IV.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum pada tahun 2021 tidak mencapai target 100% hal ini disebabkan karena dalam perubahan PAK pagu anggaran dialihkan ke sub kegiatan yang lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pujon secara menyeluruh. Tindak lanjutnya akan lebih diperhitungkan lagi pada pelaksanaan tahun anggaran berikutnya

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sudah dilaksanakan sesuai target perencanaan Rencana Kerja. Hal ini bisa tercapai karena adanya koordinasi yang baik dengan pengurus barang dalam penyediaan jasa pemeliharaan serta pajak yang dibayar tepat waktu.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan sesuai target perencanaan renja hal ini bisa terwujud karena kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor baik kinerja maupun anggarannya sudah dilaksanakan dengan maksimal guna memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya tercapai 100% dengan dukungan semua pihak yang berkepentingan yang ada di kantor Kecamatan Pujon guna pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan fasilitas yang nyaman.
8. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pada Tahun 2021 tercapai 81,59% hal ini disebabkan karena pada kegiatan FGD dengan anggota DPRD di wilayah Kecamatan Pujon yang sudah terjadwal, akan tetapi secara realita karena beberapa hal ada narasumber yang tidak hadir sehingga anggaran tidak terserap secara maksimal. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pada tahun berikutnya akan meningkatkan koordinasi dengan sekretaris Dewan Kab Malang.
9. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan pelaksanaannya sudah sesuai target perencanaan hal ini terwujud karena koordinasi yang baik di semua lini di lingkungan kantor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

10. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan tercapai 100% hal ini terlaksana karena adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah desa terkaet penanganan dan pencegahan penyebaran Virus segala upaya telah dilakukan termasuk edukasi semua masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan adap kebiasaan baru di situasi wabah virus yang masih melanda Indonesia bahkan Dunia. Tetapi dengan segala kesigapan Pemerintah kecamatan dan dibantu pemerintah desa maka di kecamatan pujon berangsur angsur membaik bahkan tidak ditemukan kasus baru.
11. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - a. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan terlaksana sesuai target perencanaan hal ini terwujud karena banyaknya kegiatan di Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum yang bersinergi dengan Kepolisian di sektor Kecamatan Pujon, dengan Koramil serta Dinas dan instansi terkaet dalam penanganan konflik-konflik yang terjadi di wilayah Kecamatan Pujon.
12. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di tahun 2021 tercapai 100% sesuai target perencanaan rencana kerja. Keberhasilan ini didukung dengan adanya pelaksanaan bimbingan teknik, sosialisasi dan konsultasi yang dilaksanakan sesuai jadwal sehingga kinerja dan anggarannya bisa maksimal di serap.
13. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa telah mencapai target perencanaan, keberhasilan didukung dengan adanya kerjasama dengan pemerintah desa serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal yang sudah dibuat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang terdapat penyesuaian Nomenklatur Program dan Kegiatan yang baru. Maka sesuai dengan Pemutakhiran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pujon Pada satu Tahun Anggaran. Tingkat capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2022 diperkirakan dapat terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan diperkirakan tercapai 100%.

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.1, dan berikut dibawah ini tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022
Kecamatan Pujon

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
	Unsur Kewilayahan			-	-	-	-			
	Kecamatan			-	-	-	-			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	71	-	-	-	-	14	14	18,42%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	11	-	-	-	-	2	2	18,18%

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5	-	-	-	-	1	1	20%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5	-	-	-	-	1	1	20%
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5	-	-	-	-	1	1	20%
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5	-	-	-	-	1	1	20%
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20	-	-	-	-	4	4	20%
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	25	-	-	-	-	5	5	20%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	35	-	-	-	-	7	7	20%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	960	-	-	-	-	192	192	20%
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	960	-	-	-	-	192	192	20%
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5	-	-	-	-	1	1	20%

1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran yang disusun	20	-	-	-	-	4	4	20%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15	-	-	-	-	3	3	20%
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5	-	-	-	-	1	1	20%
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	10	-	-	-	-	2	2	20%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja Perangkat Daerah	15	-	-	-	-	3	3	20%
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	100	-	-	-	-	20	20	20%
1.4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan Simpeg	10	-	-	-	-	2	2	20%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	35	-	-	-	-	7	7	20%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	50	-	-	-	-	10	10	20%

1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	50	-	-	-	-	10	10	20%
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	50	-	-	-	-	10	10	20%
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60	-	-	-	-	12	12	20%
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.825	-	-	-	-	365	365	20%
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	3.975	-	-	-	-	795	795	20%
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3.600	-	-	-	-	720	720	20%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20	-	-	-	-	4	4	20%
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	20	-	-	-	-	4	4	20%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	15	-	-	-	-	3	3	20%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang diadakan	385	-	-	-	-	77	77	20%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180	-	-	-	-	36	36	20%
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	240	-	-	-	-	48	48	20%

1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	40	-	-	-	-	8	8	20%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam satu tahun	40	-	-	-	-	8	8	20%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	-	-	-	-	8	8	20%
1.8.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5	-	-	-	-	1	1	20%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam satu tahun (%)	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	120	-	-	-	-	24	24	20%
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkaet	Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	120	-	-	-	-	24	24	20%

2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60	-	-	-	-	12	12	20%
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaet dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60	-	-	-	-	12	12	20%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	120	-	-	-	-	24	24	20%
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	120	-	-	-	-	24	24	20%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggara an urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	60	-	-	-	-	12	12	20%

4.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60	-	-	-	-	12	12	20%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100	-	-	-	-	20	20	20%
5.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi pemerintahan desa	100	-	-	-	-	20	20	20%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pujon

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan serta Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat. Untuk itu Kecamatan Pujon Melaksanakan 11 (Sebelas) Jenis Pelayanan Perijinan. Pelayanan perijinan di Kecamatan Pujon dilaksanakan sesuai Standart Operasional Pelayanan yang dapat diukur ketepatan waktu, proses dan evaluasinya sehingga masyarakat bisa terlayani secara prima. Dan di bawah ini pelayanan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Pujon :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
3. Pendaftaran Peternakan Rakyat (TDPR)
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. Izin Tempa Parkir Insidentil
6. Izin Reklame Insidentil
7. Pendaftaran Organesasi Kesenian dan Seniman
8. Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
10. Taman Penitipan Anak (TPA)
11. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan PATEN;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
4. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
5. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
6. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
7. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
8. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;

9. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan (Generasi muda);
10. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
11. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
12. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
13. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung kinerja sesuai tugas dan Indikator pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk Mengukur Kinerja Kecamatan Pujon yaitu:

1. Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan;
2. Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan
3. Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun
4. Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik

Selanjutnya Pencapaian Kinerja Utama Kecamatan Pujon di ukur dengan formula sebagai berikut:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 25$$

2. Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan

$$\frac{\text{Jumlah Izin Tahun } N - \text{Jumlah Izin Tahun } N-1}{\text{Jumlah Izin Tahun } N-1} \times 100 \%$$

3. Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik yang terdata}} \times 100 \%$$

4. Persentase Desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik yang terdata}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, lebih terperinci tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dapat dilihat dari Tabel 2.2. Adapun Tabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pujon
Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama (IKU)												
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			-	80,55	80,60	80,65	-	80,55	80,60	80,65	-
2.	Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan			-	20%	22%	24%	-	20%	22%	24%	-
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan			-	70%	72%	74%	-	70%	72%	74%	-
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan			-	70%	72%	74%	-	70%	72%	74%	-
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan												
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu			-	14 Dokumen	15 Dokumen	14 Dokumen	-	14 Dokumen	15 Dokumen	14 Dokumen	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu			-	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah			-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah			-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu			-	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun			-	192 OB	192 OB	192 OB	-	192 OB	192 OB	192 OB	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)			-	192 OB	192 OB	192 OB	-	192 OB	192 OB	192 OB	-
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran yang disusun			-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar			-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah			-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja Perangkat Daerah			-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan			-	20 Stel	20 Stel	20 Stel	-	20 Stel	20 Stel	20 Stel	-
1.4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan Simpeg			-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun			-	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan			-	10 Buah	10 Buah	10 Buah	-	10 Buah	10 Buah	10 Buah	-
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan			-	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	-	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	-
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah logistik kantor yang disediakan			-	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	-	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	-
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			-	12 Buah	12 Buah	12 Buah	-	12 Buah	12 Buah	12 Buah	-
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			-	365 Eksemplar	365 Eksemplar	365 Eksemplar	-	365 Eksemplar	365 Eksemplar	365 Eksemplar	-
1.5.6	Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan			-	795 HOK	795 HOK	795 HOK	-	795 HOK	795 HOK	795 HOK	-
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi			-	720 HOK	720 HOK	720 HOK	-	720 HOK	720 HOK	720 HOK	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-
1.6.1	Pengadaan mebel Jumlah Mebel yang disediakan			-	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun			-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang diadakan			-	77 OK	77 OK	77 OK	-	77 OK	77 OK	77 OK	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	-	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			-	0	0	0	0	0	0	0	Mulai PAK 2021 Pagu anggaran Dialihkan ke Sub Kegiatan lain.
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun			-	17 Unit	17 Unit	17 Unit	-	17 Unit	17 Unit	17 Unit	-
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam satu tahun			-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara			-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (%) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam satu tahun (%)			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun			-	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	-	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	-
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkaet Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			-	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	-	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaet dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (%) Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun			-	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	-	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.1.1	<p>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p> <p>Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>			-	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	-	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	-
4	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (%)</p> <p>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)</p>			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-
4.1	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun</p>			-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (%) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun			-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	-
5.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa			-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Pujon

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Serta di jelaskan di Pasal 1 ayat 6 bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan ruang lingkup PATEN meliputi Pelayanan bidang Perizinan dan Pelayanan bidang non perizinan. Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Pujon dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada .

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan (Dengan adanya Perkembangan Tehnologi Informasi Yang semakin Canggih dituntut untuk bisa mengikuti Perkembangan Tehnologi Informasi Tersebut, apalagi sekarang kepengurusan serba Online);
2. Kurang optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait sehingga dalam Pelaksanaan kegiatan ada yang kurang sepakat atau satu pikiran sehingga Pekerjaan tidak optimal dilaksanakan ;
3. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah terkaet beberapa hal yang memeng seharusnya dilaksanakan;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan lingkungan dan menjaga keamanan sekitar;

5. Masyarakat kurang menguasai tentang Penanganan /mengatasi, menanggulangi bahaya bencana Alam yang sering kali mengancam, apalagi letak geografis Kecamatan Pujon yang berupa pegunungan yang sering terjadi longsor dan banjir;
6. Dalam Formasi Kepegawaian bila ada jabatan yang kosong dan belum diisi, maka akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pujon.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran pelayanan di Kecamatan Pujon dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan;

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pujon secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

- 1) *Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*
 - a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b) Masih banyak warga yang belum tertib administrasi;
 - c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal;
 - d) Administrasi Akte Kematian sering kali tidak dilaporkan (Ahli Waria tidak Mengurus Akte Kematian);
 - e) Kartu Keluarga yang dipakai dasar semua kepengurusan sebisa mungkin selalu update data/apabila ada perubahan Kartu Keluarga Sesegera mungkin di perbaiki dan dipercepat kepengurusannya, karena akan menyangkut kepengurusan administrasi kependudukan lainnya;

- f) Kurangnya Pemahaman Masyarakat dengan Pelayanan secara Online, Apalagi masih ada saja Masyarakat yang Kurang bisa memanfaatkan Kecanggihan Tehnologi Informasi (Gagap Tehnologi).

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100% Warga desa mempunyai KK sehingga dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik/atau melengkapi data kependudukan lainnya. Dikarenakan untuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan Di masa Pandemi Covid-19 ini untuk semua jenis pelayanan/kepengurusan melalui online sehingga untuk E-KTP cetak di laksanakan di catatan sipil dan setelah selesai berkas bisa diambil di Kecamatan Masing-masing sesuai jadwal pengambilan /balasan dari WA operator Capil. Tetapi untuk surat Pindah, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Kematian bisa langsung cetak di Kecamatan. Upaya yang dapat dilakukan lagi yaitu dengan selalu Koordinasi dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil terkait Peraturan-Peraturan atau Regulasi yang baru terkait Kepengurusan Kependudukan. Upaya yang tidak kalah penting yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah desa dalam pengecekan kelengkapan administrasi atau persyaratan yang dibutuhkan, sehingga proses penyelesaian akan lebih cepat juga.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin. Kepatuhan terhadap peraturan yang ada wajib diterapkan apalagi di situasi Pemerintahan dan keadaan/kondisi negara kita yang berubah-ubah dikarenakan adanya bencana Alam dan Bencana Non Alam sehingga bermunculan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah yang baru.

Upaya yang dapat dilakukan dengan menyesuaikan administrasi berdasarkan peraturan yang terbaru.

3) *Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

- a. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) sesuai keperuntukkannya;
- b. Mekanisme dan kelengkapan pendukung SPJ masih belum sesuai ketentuan.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah:

- a. Mengadakan bintek penyusunan APBDes yang berbasis kinerja sesuai hasil musdes dengan mengacu pada pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan yang ada;
- b. Memberikan bintek dan pendampingan dalam menyusun SPJ beserta kelengkapannya agar semua pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. Secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan atau pengelolaan dana desa.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata;
- c) Budaya etos Kerja dan sinergitas antar perangkat masih perlu ditingkatkan lagi demi kemajuan desa masing –masing;
- d) Kedisiplinan, penampilan, ketaatan serta kepatuhan masih kurang.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan nara sumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

Penyelenggaraan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN), meliputi :

- 1) Perizinan. Jenis – jenis Perizinan antara lain :
 1. Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Izin Tanda Daftar Pertenakan Rakyat (TDRP);
 3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 5. Izin Reklame Insidental;
 6. Izin Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian;
 7. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 8. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 9. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak;
 10. Izin Reklame Insidental;
 11. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi yakni masih rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen Perizinan bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau proses kepengurusannya serta manfaat dan kegunaan dokumen perizinan, bahkan banyak sekali yang masih belum sadar pentingnya memiliki dokumen perizinan karena kepemilikan dokumen perizinan merupakan legalitas suatu kegiatan. Dan permasalahan yang sering kali muncul adalah dalam kepengurusan administrasi data atau dokumen persyarikat tidak lengkap sehingga harus dikembalikan dan dilengkapi sesuai persyaratan.

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan;
- b. Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan Perizinan sebagaimana pedoman yang berlaku ;
- c. Kecukupan Persyaratan untuk penerbitan Perizinan yang harus dipenuhi masih sering kurang lengkap, sehingga menimbulkan kelambatan dalam proses penerbitan ;
- d. Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Perangkat Desa tentang Persyaratan dan Prosedur Pengurusan Perizinan.

2) Permasalahan Kepengurusan AK I Kartu Kuning

Permasalahan dan Upaya yang dilakukan telah kita lakukan :

- a. Masih banyaknya pengajuan AK I yang belum sesuai dengan prosedur ;
- b. Minimnya sosialisasi dari Stakeholder yang membidangi baik dari Pemerintah maupun Lembaga lain ;

Upaya yang dilakukan yakni Sosialisasi kepada calon TKI yang akan bekerja ke Luar Negeri dan Masyarakat tentang pentingnya Kepemilikan AK I untuk kelengkapan mencari peluang kerja.

3) Pindah Tempat

Dalam rangka menekankan pentingnya data Administrasi Kependudukan utamanya adalah Surat Keterangan Pindah tempat bagi yang pindah maka Upaya yang telah dilakukan :

Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh Perangkat Desa dan Dinas Sektoral tentang pentingnya kelengkapan kepengurusan surat Pindah Tempat.

4) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek, Adanya SPPT ganda, Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan :

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan penanganan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-

masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.
- 4) Peningkatan UMKM di Masing-masing Desa untuk Membantu Perekonomian Masyarakat.
- 5) Menumbuhkembangkan Koperasi Baik Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Wanita
- 6) Kepengurusan sertifikasi HALAL dan BPOM yang terkesan Ribet.

Upaya yang dilakukan Pertama, berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stakeholder atau dinas terkait di berbagai bidang permasalahan yang ada di pemerintahan desa . Kedua, Menggandeng Dinas yang ada di Kabupaten Malang seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dinas Koperasi, dan dinas lainnya atau pihak ketiga seperti Universitas atau lembaga swasta lainnya dalam pemasaran produk UMKM atau home industri sehingga roda perekonomian bisa tetap jalan serta kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Ketiga, membantu serta mencari terobosan-terobosan dalam Kepengurusan Legalitas Usaha Home Industri maupun UMKM serta bekerjasama dengan instansi terkaet dan pihak ketiga (perguruan tinggi) dalam kepengurusan sertifikasi Halal dan BPOM.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Masih adanya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah;
- 5) Masih banyaknya masyarakat yang hidupnya belum sejahtera;
- 6) Masih perlu ditingkatkan organisasi kepemudaan/ Karang taruna di wilayah kecamatan Pujon;
- 7) Permasalahan Stunting masih ada di Kecamatan Pujon.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat:

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan adalah:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Bekerjasama dengan instansi terkaet (BPBD) dalam pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana di wilayah Kecamatan Pujon;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala di organisasi-organisasi yang ada di wilayah desa serta di sekolahan-sekolahan baik SD, SMP, SMA dan sekolah sederajat lainnya;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023. Uraian hasil Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka Si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN					3.569.535.686						3.111.727.800
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Kec Pujon	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	100%	2.722.386.230	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Kec Pujon	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	100%	2.758.099.059	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	15 Dokumen	16.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	11 Dokumen	24.366.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	609.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Pujon	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000						

1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Pujon	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000						
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Pujon	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Pujon	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	19.980.000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan dan Perubahan DPA-SKPD	Kec Pujon	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000						
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Pujon	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Pujon	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	3.777.000	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan	3.500.000						

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	7 Dokumen	2.399.123.930	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	24 Dokumen	2.417.340.323	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Pujon	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	192 OB	2.182.532.686	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Pujon	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	192 OB	2.236.239.923	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Pujon	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	192 OB	178.796.160	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Pujon	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	181.100.400	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Pujon	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	29.795.084						
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kec Pujon	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	4 Laporan	8.000.000						

1.3	Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen	4.500.000	Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah Laporan barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 Laporan	750.000	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec Pujon	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000						
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Pujon	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	3.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Pujon	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	750.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	7.900.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	9.320.000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Pujon	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	3 Paket	6.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Pujon	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	3 Paket	7.820.000	
1.4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec Pujon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec Pujon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	1.500.000	

1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Pujon	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	7 Dokumen	195.533.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	40 Dokumen	157.960.736	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Pujon	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor	Kec Pujon	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	982.000	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Pujon	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Pujon	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	47.107.800	
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Pujon	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	22.528.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Pujon	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	20.660.000	
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Pujon	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	21.138.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Pujon	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12.182.936	
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Pujon	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.825.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	Kec Pujon	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	2.628.000	
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Pujon	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	39.782.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Pujon	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	40.200.000	
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Pujon	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.260.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Pujon	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	34.200.000	

1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kec Pujon	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah	9 Unit	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kec Pujon	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah	10 Unit	66.966.000	
1.6.1	Pengadaan Mebel	Kec Pujon	Jumlah paket mebel yang diadakan	4 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kec Pujon	Jumlah paket mebel yang diadakan	5 Unit	30.000.000	
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec Pujon	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec Pujon	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	36.966.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Pujon	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	36 Laporan	24.240.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Pujon	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	24 Laporan	25.500.000	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Pujon	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	3.840.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Pujon	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	6.000.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Pujon	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	12 Laporan	13,200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Pujon	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	12 Laporan	19.500.000	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Pujon	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	12 Laporan	7.200.000						

1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Pujon	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam satu tahun	8 Unit	54.588.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Pujon	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam satu tahun	17 Unit	55.896.000	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Kec Pujon	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	29.256.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Kec Pujon	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	35.904.000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec Pujon	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec Pujon	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	1.116.000	
1.8.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Pujon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	19.332.900	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Pujon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	18.878.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Pujon	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	787.149.456	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Pujon	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	268.523.741	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Pujon	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	12 Laporan	744.455.865	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Pujon	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	12 Laporan	257.843.741	

2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkaet	Kec Pujon	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkaet	12 Laporan	744.455.865	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pem. dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkaet	Kec Pujon	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkaet	12 Laporan	257.843.741	
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Kec Pujon	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	12 Laporan	42.693.591	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Kec Pujon	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	12 Laporan	10.680.000	
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaet dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec Pujon	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	42.693.591	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaet dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec Pujon	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	10.680.000	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Pujon	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	20.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Pujon	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	55.595.000	
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Kec Pujon	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 Laporan	20.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Kec Pujon	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 Laporan	55.595.000	

3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Pujon	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Pujon	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	55.595.000	
4	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Pujon	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	20.000.000	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Pujon	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	9.000.000	
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Pujon	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	1 Kegiatan	20.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Pujon	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	1 Kegiatan	9.000.000	
4.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Pujon	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Orang	20.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Pujon	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Orang	9.000.000	

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Pujon	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	20.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Pujon	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	20.510.000	
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Pujon	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	12 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Pujon	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	12 Dokumen	20.510.000	
5.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Pujon	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Pujon	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	20.510.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2023.

Uraian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dari Para Pemangku
Keperentingan Tahun 2023

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat secara Prima, dan selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan baik pelayanan paten maupun pelayanan non Paten. Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, pelimpahan wewenang tersebut antara lain:

- Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Izin Usaha Perdagangan
- Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat
- Izin Pendirian Taman Penitipan Anak
- Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan
- Izin Parkir Insidentil
- Izin Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian
- Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
- Izin Tanda Daftar Peternakan Rakyat

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender. Yang di atur juga di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal, untuk itu Kecamatan Pujon Kabupaten Malang berupaya semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat Kecamatan Pujon di semua bidang dengan baik, tulus dan ikhlas yang sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Pujon yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan, dan yang menjadi sasaran adalah semua masyarakat Kecamatan Pujon. Pemerintahan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Malang, untuk itu Sistem Perencanaan yang ada di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu **MALANG MAKMUR** yang dijabarkan dengan **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”** dengan 5 Misi, dan yang berkaitan dengan Pemerintahan Kecamatan adalah Misi 3 untuk itu Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Mendukung Misi 3 yaitu **Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa.**

Penjabaran Lima Misi tersebut adalah:

1. MISI ke 1

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA UNGGUL;

Merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. MISI ke 2

MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN DEMOKRATIS, TERTIB, DAN AGAMIS BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA;

Dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Misi ini juga di maknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.

3. **MISI ke 3**

MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DESA

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Mendukung Misi ke 3, Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada Konektifitas dan Aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa Mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu. Dan Kecamatan Pujon mendukung Misi ke 3 ini.

4. **MISI ke 4**

MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA, MANDIRI DAN SEJAHTERA

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

5. **MISI ke 5**

MEMPERLUAS PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, SENI BUDAYA, INDUSTRI KREATIF DAN INVESTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu tata ruang wilayah dan kelestarian berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya sebagai daya saing daerah dalam rangka peningkatan iklim investasi dengan tetap menjaga keseimbangan dan ekosistem sumber daya alam. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Pemenuhan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pujon Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pujon.

2. Sasaran:

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan
- b. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan.
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2023 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam mencapai keberhasilan tujuan Pembangunan melaksanakan 5 program 13 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang sudah di input di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan rincian sebagai berikut:

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Pengadaan Mebel

1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan

1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkaet

2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat

2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaet dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan

3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum

3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

4.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan di bawah ini penyajian tabel 3.1

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Pujon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Ca tat an Pen ting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
							Pro gram	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7																
7	0 1										3.111.727.800					3.111.727.800
7	0 1	0 1									2.758.099.059	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	2.758.099.059

7	0 1	0 1	2 1		Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	11 Dokumen	100%	24.366.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	24.366.000
7	0 1	0 1	2 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	11 Dokumen	100%	609.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	609.000
7	0 1	0 1	2 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	11 Dokumen	100%	19.980.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	19.980.000

7	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koord.penyusunan lap. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	5 Laporan	11 Dokumen	100%	3.777.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	3.777.000					
7	0	0	2	1	1	2	Adminis trasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	24 Dokumen	100%	2.417.340.323	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	2.417.340.323			
7	0	0	2	0	1	1	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	192 OB	24 Dokumen	100%	2.236.239.923	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	2.236.239.923

7	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	100%	181.100.400	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	181.100.400
7	0	0	2	0	Adminis trasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan teradminis trasi dengan benar	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	2 Laporan	100%	750.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	750.000
7	0	0	2	0	Rekonsilia si dan Penyusun an Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusun an laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan teradminis trasi dengan benar	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	750.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	750.000

7	0	0	2		Adminis trasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen pelayanan kepegawai an perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	3 Dokumen	100%	9.320.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	9.320.000
7	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah dokumen pelayanan kepegawai an perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	21 Paket	3 Dokumen	100%	7.820.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	7.820.000
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksana an Sistem Informasi Kepegawai an	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksana an Sistem Informasi Kepegawai an	Jumlah dokumen pelayanan kepegawai an perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	100%	1.500.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	1.500.000
7	0	0	2		Adminis trasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan an Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	40 Dokumen	100%	157.960.736	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD dalam Satu Tahun (%)	100%	157.960.736

7	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	3 Paket	40 Dokumen	100%	982.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	982.000
7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Paket	40 Dokumen	100%	47.107.800	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	47.107.800
7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Paket	40 Dokumen	100%	20.660.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	20.660.000
7	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Paket	40 Dokumen	100%	12.182.936	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	12.182.936

7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	40 Dokumen	100%	2.628.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	2.628.000
7	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	40 Dokumen	100%	40.200.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	40.200.000
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	40 Dokumen	100%	34.200.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	34.200.000
7	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah unit pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daera	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	10 Unit	100%	66.966.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	66.966.000

7	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket mebel yang diadakan	Jumlah unit pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	5 Unit	10 Unit	100%	30.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	30.000.000
7	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	5 Unit	10 Unit	100%	36.966.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	36.966.000
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	24 Laporan	100%	25.500.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	25.500.000

7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan penyediaan n Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%	6.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	6.000.000
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%	19.500.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	19.500.000
7	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	17 Unit	100%	55.896.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	55.896.000
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan an % Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	8 Unit	17 Unit	100%	35.904.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	35.904.000

7	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	8 Unit	17 Unit	100%	1.116.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	1.116.000
7	0	0	2	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	17 Unit	100%	18.878.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	18.878.000
7	0	0	2	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	20%	268.523.741	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	268.523.741
7	0	0	2	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Laporan	20%	257.843.741	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	257.843.741

7	0	0	2	0	Koordinasi/ Sinergi Perencana an dan Pelaksana an kegiatan pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkaet	Persentase Penyelengga raan Pemerintah an dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an kegiatan pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkaet	Jumlah laporan Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun	Persentase Peningkat an Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Laporan	20%	257.843.741	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelengga raan Pemerintah an dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	257.843.741
7	0	0	2	0	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang dilimpah kan Kepada Camat	Persentase Penyeleng garaan Pemerinta han dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah laporan Pelaksana an Urusan Pemerintah an yang dilimpah kan Kepada Camat	Persentase Peningkat an Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbit kan oleh Kecamat an	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Laporan	20%	10.680.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyeleng garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	10.680.000
7	0	0	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang terkaet dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Persentase Penyelengga raan Pemerinta han dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan Pelaksana an Kewenang an lain yang dilimpah kan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Peningkat an Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Laporan	20%	10.680.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelengga raan Pemerintah an dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	10.680.000
7	0	0	0	0	PROGRAM KOORDINA SI KETEN TRAMAN DAN KETERTIB AN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentra man dan Ketertiban Umum dalam satu tahun(%)	-	-	Persentase Konflik yang diselesaik an dalam satu tahun	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	70%	55.595.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentra man dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%	55.595.000

7	0	0	2			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun(%)	-	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Laporan	70%	55.595.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%	55.595.000
7	0	0	2	0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun(%)	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Laporan	70%	55.595.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%	55.595.000
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah an Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	70%	9.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	9.000.000

7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	1 Kegiatan	70%	9.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	9.000.000
7	0	0	2	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	480 Orang	1 Kegiatan	70%	9.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	9.000.000
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persentase desa dan Kelurahan yang memiliki Administrasi yang baik	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	70%	20.510.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	20.510.000

7	0	0	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang difasilitasi	Persentase desa dan Kelurahan yang memiliki Administrasi yang baik	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Dokumen	70%	20.510.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	20.510.000
7	0	0	2	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang difasilitasi	Persentase desa dan Kelurahan yang memiliki Administrasi yang baik	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	20.510.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	20.510.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PUJON

Perencanaan Program Pendanaan bisa diartikan dengan Proses Penetapan Program yang mana saja yang akan digunakan atau dilaksanakan organisasi atau perangkat daerah dengan perkiraan pemakaian jumlah sumber daya atau anggaran yang akan dialokasikan ke setiap program selama satu tahun, dengan tetap memperhatikan Potensi, Peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 di danai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada tahun 2023 adalah 5 Program, 13 Kegiatan , dan 27 Sub Kegiatan. Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Kecamatan Pujon Tahun 2023 diuraikan pada Tabel 4.1 dan di bawah ini uraian Tabel 4.1

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pujon Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023							Keterangan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7	0 1	KECAMATAN										3.111.727.800		
7	0 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	-	2.758.099.059	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

7	0	0	2		Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah Dokumen Perencana naa, Pengang garan dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	11 Dokumen	100%	24.366.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencana naan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen perencana an perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengang garan dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	11 Dokumen	100%	609.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusun an dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengang garan dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	11 Dokumen	100%	19.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

7	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	5 Laporan	11 Dokumen	100%	3.777.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	2	Adminis trasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	24 Dokumen	100%	2.417.340.323	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	192 OB	24 Dokumen	100%	2.236.239.923	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

7	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	100%	181.100.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	0	Adminis trasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan teradmi nistrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	2 Laporan	100%	750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan teradmi nistrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

7	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	3 Dokumen	100%	9.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	21 Paket	3 Dokumen	100%	7.820.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	100%	1.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

7	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan an Dukungan Manajemen Perkantoran an Dan Penunjang Kinerja PD dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen Pelayanan an Pemenuhan an Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	40 Dokumen	100%	157.960.736	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan an Adminis trasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	3 Paket	40 Dokumen	100%	982.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan an Adminis trasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Paket	40 Dokumen	100%	47.107.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket bahan logistik kantor ang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan an Adminis trasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Paket	40 Dokumen	100%	20.660.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

7	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah dokumen pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Paket	40 Dokumen	100%	12.182.936	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	40 Dokumen	100%	2.628.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	40 Dokumen	100%	40.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	40 Dokumen	100%	34.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

7	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah unit pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	10 Unit	100%	66.966.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket mebel yang diadakan	Jumlah unit pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	5 Unit	10 Unit	100%	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	5 Unit	10 Unit	100%	36.966.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah lapPenyediaan Jasa Penunjang Opr. Perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	24 Laporan	100%	25.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan penyedia an Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang terbayan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan penyedia an Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang terbayan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%	19.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	17 Unit	100%	55.896.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	8 Unit	17 Unit	100%	35.904.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	8 Unit	17 Unit	100%	1.116.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	17 Unit	100%	18.878.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

7	0	0				PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	20%	268.523.741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Laporan	20%	257.843.741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2	0		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkaet	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkaet	Jumlah laporan Koordinasi/ Sinergi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Laporan	20%	257.843.741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

7	0	0	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Laporan	20%	10.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaet dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Laporan	20%	10.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETEN TRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)	-	-	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	70%	55.595.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)	-	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Laporan	70%	55.595.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

7	0	0	2	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Laporan	70%	55.595.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	1	5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	70%	9.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	1 Kegiatan	70%	9.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

7	0	0	2	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	480 Orang	1 Kegiatan	70%	9.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persentase desa dan Kelurahan yang memiliki Administrasi yang baik	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	70%	20.510.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Persentase desa dan Kelurahan yang memiliki Administrasi yang baik	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Dokumen	70%	20.510.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

7	0	0	2	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Persentase desa dan Kelurahan yang memiliki Administrasi yang baik	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	20.510.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	-------------------------------------	------	---------------	---------------	------	------------	------------------------------	--

Perencanaan serta target anggaran sangatlah penting di buat dengan tujuan realisasi bisa sesuai rancangan anggaran awal serta tidak menyimpang jauh dari perencanaan anggaran yang sudah dibuat. Dengan kata lain Rencana Kerja Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2023 di Susun agar Kinerja bisa tercapai secara Maksimal. Sedangkan Rencana Penyerapan anggaran pada masing-masing Triwulan di harapkan bisa tercapai sehingga pada akhir tahun anggaran penyerapan bisa dilaksanakan sesuai rencana. Adapun Rencana Kerja Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.2. Adapun Uraiannya adalah Sebagai Berikut:

Tabel 4.2
Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan
Kecamatan Pujon Tahun 2023

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerin tahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023							Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								K E T	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana	I		II		III		IV			
							Pro gram	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	0 1	KECAMATAN										3.111.727.800		11,28	11,28	19,99	19,99	27,78	27,78	40,95	40,95	
7	0 1 1	PROG RAM PENUN JANG URUSAN PEME RINTAH AN DAE RAH KAB/ KOTA	Persenta se Pemenuh an Dukung an Manaje men Perkantoran Dan Penun jang Kinerja Perang kat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persenta se Pemenuh an layanan Internal Perang kat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurah an	100%	-	-	-	2.758.099.059	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	6,41	6,41	24,94	24,94	13,87	13,87	54,78	54,78	

7	0	0	2		Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	11 Dokumen	100%	24.366.000	PENDAPATAN ASLI DAE RAH (PAD)	6,67	6,67	23,33	23,33	38,33	38,33	31,67	31,67
7	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	11 Dokumen	100%	609.000	PENDAPATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	0	0	50	50	50	50
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	11 Dokumen	100%	19.980.000	PENDAPATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	50	50	25	25	25	25

7	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	5 Laporan	11 Dokumen	100%	3.777.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20	20	20	20	40	40	20	20		
7	0	0	2	1	1	2	Adminis trasi Keu angan Perang kat Daerah	Persenta se Pemenuh an Dukung an Manajem en Perkantoran Dan Penunja ng Kinerja Perang kat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen pemenuh an kinerja pelayanan keuangan PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persenta se Pemenuh an layanan Internal Perang kat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	24 Dokumen	100%	2.417.340.323	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	25	25	25	25	25	25	25	25

7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	192 OB	24 Dokumen	100%	2.236.239.923	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	25	25	25	25	25	25	25	25
7	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	100%	201.080.400	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	25	25	25	25	25	25	25	25
7	0	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dim 1 thn	-	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada PD disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	2 Laporan	100%	750.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	50	50	0	0	50	50

7	0	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam satu tahun	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada PD disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	750.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	50	50	0	0	50	50	
7	0	0	2	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	3 Dokumen	100%	9.320.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	25	25	0	0	75	75	
7	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	3 Paket	3 Dokumen	100%	7.820.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	0	0	0	0	100	100	

7	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	100%	1.500.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	50	50	0	0	50	50
7	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD dalam satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	40 Dokumen	100%	157.960.736	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	7,14	7,14	42,86	42,86	14,29	14,29	35,71	35,71
7	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD dalam satu Tahun (%)	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	3 Paket	40 Dokumen	100%	982.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	50	50	0	0	50	50

7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Paket	40 Dokumen	100%	47.107.800	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	50	50	0	0	50	50
7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket barang logistik kantor yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Paket	40 Dokumen	100%	20.660.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	50	50	25	25	25	25
7	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Paket	40 Dokumen	100%	12.182.936	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	25	25	25	25	25	25	25	25

7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	40 Dokumen	100%	2.628.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	25	25	25	25	25	25	25	25
7	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	40 Dokumen	100%	40.200.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	50	50	0	0	50	50
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	40 Dokumen	100%	34.200.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	50	50	25	25	25	25

7	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah unit pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	10 Unit	100%	66.966.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD	0	0	0	0	0	0	100	100	
7	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah paket mebel yang diadakan	Jumlah unit pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	5 Unit	10 Unit	100%	30.000.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	0	0	0	0	100	100	
7	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	5 Unit	10 Unit	100%	36.966.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	0	0	0	0	100	100	

7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	24 Laporan	100%	25.500.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	12,5	12,5	25	25	25	25	37,5	37,5	
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%	6.000.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	25	25	25	25	50	50	
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja PD Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%	19.500.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	25	25	25	25	25	25	25	25	

7	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	7 Unit	100%	55.896.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	8,33	8,33	8,33	8,33	83,34	83,34	
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	8 Unit	17 Unit	100%	35.904.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	0	0	0	100	100	
7	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	8 Unit	17 Unit	100%	1.116.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	25	25	25	25	50	50	

7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	17 Unit	100%	18.878.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	0	0	0	100	100
7	0	0	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	-	268.523.741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12,5	12,5	25	25	25	25	37,5	37,5

7	0	0	2	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Laporan	100%	257.843.741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
7	0	0	2	0	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkaet	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkaet	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	257.843.741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7	0	0	2	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Laporan	100%	10.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	25	25	25	25	50	50		

7	0	0	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaet dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	10.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	25	25	25	25	50	50
7	0	0	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	-	55.595.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	25	25	25	25	50	50
7	0	0	2	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Laporan	100%	55.595.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	25	25	25	25	50	50

7	0	0	2	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	55.595.000	PEN DA PATAN ASLI DAE RAH (PAD)	0	0	25	25	25	25	50	50
7	0	0	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyeenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	-	9.000.000		0	0	0	0	50	50	50	50
7	0	0	2	1	Penyeenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyeenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	1 Kegiatan		9.000.000		0	0	0	0	50	50	50	50

7	0	0	2	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	480 Orang	1 Kegiatan	100%	9.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	0	25	25	25	25
7	0	0	6	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	-	-	Persentase desa dan Kelurahan yang memiliki Administrasi yang baik	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	-	-	20.510.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	50	50	0	0	50	50
7	0	0	2	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	-	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Persentase desa dan Kelurahan yang memiliki Administrasi yang baik	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	-	12 Dokumen	100%	20.510.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	50	50	0	0	50	50

7	0	0	2	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	Jumlah dokumen yang difasilitasi	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang difasilitasi	Persentase desa dan Kelurahan yang memiliki Administrasi yang baik	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	20.510.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	50	50	0	0	50	50
---	---	---	---	---	--	--	----------------------------------	--	--	-------------------------------------	------	------------	------------	------	------------	------------------------------	---	---	----	----	---	---	----	----

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Pada Tahun 2023 Rencana Kerja Kecamatan Pujon terdapat 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terjadi perubahan yang disebabkan adanya kebijakan baru kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2023, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Pujon Tahun 2023 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang dikali 25
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	$\frac{\sum \text{Izin Tahun N} - \sum \text{Ijin Tahun N-1}}{\sum \text{Ijin Tahun N-1}} \times 100\%$
			Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	$\frac{\sum \text{konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{konflik yang terdata}} \times 100\%$
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	$\frac{\sum \text{Desa dan Kelurahan yang Administrasi Baik}}{\sum \text{Desa Kelurahan}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang (NRR)}}{\text{Unsur}} \times 25$	80,50%	80,55%	80,60%	80,65%	80,70%	80,75%